

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Manajemen Pemerintahan

Pemerintah adalah suatu organisasi atau alat yang melaksanakan tugas dan fungsi sedangkan pemerintahan adalah fungsi pemerintahan. Definisi terbaik pemerintah adalah lembaga negara terorganisir yang menunjukkan dan menjalankan wewenang atau kekuasaannya, sudut pandang ini menjelaskan konsep kekuasaan dalam pemerintahan menyiratkan bahwa pemerintahan tanpa kekuasaan tidak akan dapat berfungsi (Sari et al., 2020)

Dalam pengelolaan negara hal yang paling penting adalah pemerintah yang merupakan struktur politik kongkrit. Pemerintah berasal dari kata *gubernare* yang artinya mengarahkan, menjejaki, dan mengemudi, kata ini berasal dari bahasa latin. Menurut Plato dalam (Haboddin, 2015) pemerintahan merupakan proses mengarahkan para pemimpin politik untuk bertindak sebagai pengemudi. Dari pengertian Plato meletakkan peran sentral pemimpin dalam melaksanakan roda pemerintah. Pemimpin politik itu ada pengemudi dan juga penunjuk arah untuk masyarakat. Berbeda dengan Plato yang lebih menekankan peran penting pemimpin politik, David Apter menyebutkan bahwa pemerintah merupakan sekumpulan khusus individu-individu yang telah menetapkan tanggung jawab untuk mengadaptasi atau mempertahankan sistem dimana mereka menjadi bagiannya. Melaksanakan tanggungjawab dengan membuat pilihan yang mengikat anggotanya.

Selain pendapat dari Plato dan Apter mengenai pemerintahan, ada pula pendapat lain yang berkaitan dengan pemerintah yang menyebutkan pemerintah berasal dari kata perintah yang memiliki 4 unsur yakni *pertama*, kedua belah pihak saling memiliki keterikatan kontraktual. *Kedua*, pihak yang diperintah mempunyai ketaatan. *Ketiga*, dua pihak yang saling terikat. *Keempat*, pihak yang memerintah mempunyai wewenang (Rahman, 2018). Sedangkan menurut Adam dan Jessica, pengertian pemerintah adalah individu atau lembaga organisasi yang memiliki otoritas dalam melaksanakan kekuasaan menurut tata aturan yang berlaku. Lembaga yang melaksanakan organisasi yakni dinas, badan, birokrasi dan departemen, yang akan menghubungkan antara yang diperintah dengan yang memerintah. Selain itu Roy dan Bernard mendefinisikan pemerintahan sebagai tindakan keinginan yang bisa merubah kebijakan. Oleh karena itu, pemerintah bertugas untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusinya (Haboddin, 2015).

Dari beberapa istilah tersebut, hal yang paling menarik dari pengertian pemerintahan ini adalah pemerintahan diposisikan sebagai solusi bagi masyarakat. Pandangan ini menghadirkan dampak positif bagi kehadiran pemerintah. Karena sebagai solusi maka eksistensi pemerintah selalu dibutuhkan bagi masyarakat. Untuk negara-negara sosialis tentu peran dan fungsi pemerintahan sangat besar dalam menyediakan pelayanan pendidikan, pertumbuhan ekonomi, pensiunan, pembangunan sosial, hingga menjamin keamanan dan ketertiban. Dalam artian, dengan banyaknya tugas dan fungsi pemerintahan ini, tidak dapat digantikan dengan institusi lain, termasuk masyarakat sipil dan pasar. Untuk menjalankan

tujuan negara, pemerintah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pemerintahan dalam suatu negara. Dalam arti luas pemerintahan terbagi berdasarkan ajaran Trias Politica dan Montesquieu yang terdiri dari pembentukan undang-undang, pelaksanaan dan peradilan (Haudi, 2021).

Manajemen publik merupakan faktor dalam suatu administrasi publik (administrasi publik) untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan sarana dan prasarana yang tersedia, termasuk organisasi dan sumber dana serta sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, tata kelola manajemen dalam suatu organisasi tidak lebih dari faktor usaha. Upaya tersebut diwujudkan dalam berbagai kegiatan pemerintahan yang mencakup berbagai aspek kehidupan dan penghidupan warga dan masyarakat.

2.2 Fungsi Pemerintahan

Menurut ilmuan Inggris, Anthony Giddens dalam (Haboddin, 2015) fungsi pemerintahan sangat luas dalam kehidupan masyarakatnya. Pada abad ke 20 penulisan fungsi pemerintah banyak disukai oleh ilmuan sosial, pemerintahan dan politik dari hasil penelitian bermacam literatur menyediakan bukti baru bahwa fungsi pemerintahan kian banyak yang menekuni. Untuk keperluan tersebut maka ada beberapa pendapat yang dianggap representatif dan kredibel yang berhasil memantau fungsi-fungsi pemerintahan.

Ryaas Rasyid dalam (Rahman, 2018) yang merupakan pakar pemerintahan sekaligus arsitek desentralisasi dalam makna pemerintahan membagi tujuh fungsi pokok pemerintahan yakni:

1. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan adanya serangan dari luar serta menjaga supaya tidak ada pemberontakan dari dalam yang bisa menggulingkan pemerintahan yang sah dengan tindakan kekerasan.
2. Memelihara ketertiban antara warga masyarakat dan menjamin perubahan apapun yang terjadi dalam masyarakat berlangsung damai.
3. Menjamin penerapan perlakuan adil pada semua masyarakat tanpa membedakan status.
4. Melaksanakan pekerjaan umum serta memberikan pelayanan bidang-bidang yang tidak bisa dilakukan oleh pemerintahan contohnya pembangunan jalan, penyediaan fasilitas pendidikan yang terjangkau untuk masyarakat yang berpendapatan rendah, pelayanan pos serta pencegahan penyakit menular.
5. Melaksanakan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan sosial
6. Menetapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
7. Menetapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Ringkasan fungsi pemerintahan menurut pandangan Ryaas perlu ditambah.

Sosiolog Lauer berpendapat bahwa ada tiga fungsi pemerintahan yakni:

1. Peran pemerintah menciptakan keadaan yang mempermudah pembangunan ekonomi, namun tidak untuk berperan aktif didalamnya. Kebijakan ini memiliki arti seperti memberikan jaminan kestabilan sosial dan mendukung bermacam jenis pembangunan perdagangan dan industri yang dilaksanakan pengusaha swasta.

2. Pemerintah secara aktif mengatur proses pembangunan hingga ketaraf tertentu misalnya melakukan perlindungan tertentu untuk suatu kelompok yang mempunyai kepentingan sehingga mereka tidak bisa dikalahkan oleh kelompok lain yang lebih kuat, sehingga keadaan tetap dipertahankan.
3. Pemerintahan terlibat langsung dalam proses pembangunan ekonomi melalui mekanisme seperti nasionalisasi cabang-cabang industri tertentu, spesifikasi prioritas dan tujuan nasional serta menetapkan bermacam jenis sumber daya penting dalam pembangunan.

Sangat jelas perbedaan fungsi pemerintahan antara pendapat Ryaas dengan Lauer. Ryaas memberikan tekanan bahwa fungsi pemerintah sangat bernuansa politik pemerintahan. Sedangkan, Lauer lebih mengarah pada pembangunan ekonomi. Sedangkan menurut Bintoro Tjokroamidjojo dalam (Sari et al., 2020) Peran pemerintah terutama untuk memberikan arahan dan bimbingan, serta membina iklim yang kondusif bagi berkembangnya kegiatan masyarakat. Menurutnya, peran dan fungsi pemerintah dalam Perkembangan masyarakat tergantung pada sejumlah faktor, termasuk falsafah hidup masyarakat dan falsafah politik. Fungsi pemerintahan meliputi fungsi pelayanan (service), pemberdayaan, dan pembangunan.

2.3 Konsep Peran

Istilah peran dalam kamus bahasa Indonesia mempunyai makna sebagai pemain sandiwara atau komedian dalam permainan makyong dan seperangkat perilaku yang diharapkan oleh masyarakat. Menurut Abu Ahmadi, peran bermakna seperangkat harapan manusia terhadap bagaimana seseorang

semestinya bersikap dan bertindak dalam keadaan tertentu sesuai dengan status dan fungsi sosialnya (Ahmadi, 2016). Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, peran memiliki arti sebagai aspek dinamis dari sebuah status atau kedudukan, seseorang disebut berperan jika melaksanakan hak dan tanggungjawabnya sesuai dengan kedudukannya (Soekanto, 2016). Peran merupakan perilaku manusia yang berharap untuk melakukan perubahan yang mengarah pada kemajuan. Rivai mengatakan peran berkaitan dengan kinerja seseorang, peran pemimpin bisa digunakan dalam menentukan apakah bawahannya mampu memaksimalkan kinerjanya terhadap tugas yang diberikan kepadanya.

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa peran meliputi segala tindakan atau perilaku yang diharapkan banyak orang atau kelompok orang dari seseorang yang memiliki status dalam posisi tertentu untuk berperilaku seperti yang ditentukan.

2.4 Peran Pemerintah

Kewenangan dan kemampuan untuk mengelola dan melaksanakan program pembangunan daerah merupakan peran pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah. Karena keberhasilan proses penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan didaerah ditentukan oleh pemerintah daerah, fungsi utama pemerintah daerah adalah pembangunan daerah. Akibatnya, perencanaan pembangunan daerah memerlukan peran serta seluruh elemen pemerintah daerah (*stakeholder*) didaerah. Salah satu pembangunan yang menjadi perhatian adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan syarat mutlak untuk melaksanakan pembangunan. Kompetensi individu dituntut setiap manusia untuk berinovasi guna memacu pembangunan ekonomi disegala bidang. Meningkatkan Karena tidak semua orang yang menempuh jalur pendidikan otomatis berkualitas, kualitas sumber daya manusia merupakan investasi manusia jangka panjang. Dalam dunia kerja, masih diperlukan proses untuk maju ketingkat keahlian atau kualitas yang lebih tinggi. Namun, sumber daya manusia di Indonesia masih belum cukup berkualitas untuk mendukung penuh laju pertumbuhan ekonomi negara. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain masalah pendidikan, kesejahteraan sosial dan ketenagakerjaan.

Secara operasional, upaya peningkatan kualitas SDM diselenggarakan melalui beberapa sektor pembangunan salah satunya kesehatan. Berkaitan dengan kesehatan, tentu Malnutrisi atau kekurangan gizi adalah salah satu penyebab utama penyakit dan kematian dini. Sering gagal memenuhi kebutuhan kalori harian yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan. Kebutuhan kalori, protein, vitamin, dan mineral minimum dalam pangan harus diperhatikan dari segi kualitas oleh SDM selama proses pengembangan. Ini mempengaruhi perkembangan fisik, kemampuan penalaran dan perkembangan mental satu sama lain (Siregar, 2017).

Sejak PJP I pemerintah Indonesia telah berupaya untuk meningkatkan gizi dengan menerapkan penggunaan Air Susu Ibu (ASI), menyediakan posyandu dengan tenaga medis dan berbagai imunisasi untuk ibu hamil dan anak di bawah usia lima tahun serta perbaikan gizi, semua itu guna meningkatkan kualitas manusia dimasa depan dan memperpanjang usia harapan hidup anak Indonesia.

Sebagai hasil dari PJP II, diharapkan anak Indonesia mampu berkembang menjadi manusia berkualitas yang mampu mendukung roda perkembangan masa depan.

2.5 Indikator Peran

Berikut beberapa indikator peran menurut (Tesoriero & Frank, 2016) :

a. Peran Fasilitator

Peran fasilitator adalah memfasilitasi kebutuhan dengan memberikan penguatan, mengakui dan menghargai kontribusi pekerjaan yang dimiliki oleh individu, kelompok atau masyarakat dalam rangka meningkatkan produktivitas. Juga terkait dengan stimulasi dan dukungan pengembangan masyarakat. Membantu dalam penyelesaian masalah sosial dengan bernegosiasi, menawarkan dukungan, mencapai konsensus, memfasilitasi kelompok dan mengatur sumber daya.

b. Peran Edukasi

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang dapat dilihat dari peran seorang pekerja masyarakat, dengan berbagai keahliannya dalam memberikan pendidikan. Demikian pula BKKBN berperan dalam bentuk agenda untuk membantu tidak hanya melaksanakan proses peningkatan produktivitas, tetapi juga berperan aktif dalam memberikan masukan dalam hal peningkatan keterampilan, pengetahuan dan pengalaman bagi individu, kelompok dan masyarakat. Dalam beberapa kasus, seperti mengajar orang bagaimana berinteraksi dengan orang lain.

c. Peran Representasional

Menunjukkan signifikansi perilaku peran pekerja masyarakat dalam berinteraksi dengan pihak luar untuk kepentingan tertentu atau berguna bagi masyarakat. Keterlibatan BKKBN dalam berinteraksi dengan lembaga masyarakat ditujukan untuk kepentingan individu, guna mendapatkan kerjasama dengan lembaga terkait, seperti dalam kelompok dan dalam masyarakat. Peran ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi, sumber, advokasi, penggunaan media sosial, membangun hubungan komunitas, jaringan dan berbagi pengetahuan serta pengalaman.

d. Peran Keterampilan Teknis

Kemampuan pegawai BKKBN dalam mengumpulkan dan menganalisis data, keterampilan menggunakan komputer, keterampilan presentasi, pengelolaan keuangan atau finansial dan pengembangan potensi individu, kelompok dan masyarakat. Berbagai keterampilan teknis untuk membantu proses pengembangan masyarakat.

2.6 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Lembaga Pemerintah Non Kementerian Republik Indonesia yang membidangi masalah kependudukan dan keluarga berencana adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga pemerintah non kementerian yang melapor kepada presiden melalui Menteri Kesehatan. Misi BKKBN adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian kependudukan dan pelaksanaan KB.

Program Keluarga Berencana Nasional merupakan salah satu program yang dilaksanakan pada masa pasca Reformasi untuk meningkatkan kualitas kependudukan, kualitas sumber daya manusia, kesehatan dan kesejahteraan sosial melalui pengendalian kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, peningkatan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga dan BKKBN juga ditunjuk sebagai penanggung jawab *stunting*.

2.7 Definisi *Stunting*

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada balita karena kurang gizi kronis terutama pada seribu pertama kehidupan yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak anak dan beresiko lebih tinggi menderita penyakit kronis pada usia dewasa. *Stunting* dan pendek merupakan suatu hal yang berbeda penderita *stunting* memang memiliki tubuh yang pendek tetapi tidak semua anak yang memiliki tubuh pendek menderita *stunting*. Namun ada juga yang menganggap antara *stunting* dan pendek itu sama. Hal ini biasanya, definisi *stunting* sama dengan pendek tanpa perlu diagnosis yang sulit. Namun, untuk keperluan klinis seorang dokter harus mampu membedakan antara *stunting* dengan pendek (Prawirohartono, 2021).

UNICEF mengatakan seorang anak bisa dikatakan *stunting* jika *height-for age Z score* (HAZ) < 2 SD berdasarkan *growth reference* yang sedang berlaku *below minus two standard deviations from median height for age of reference population* (UNICEF, 2019). Berlandaskan pengertian tersebut bisa dikatakan semua anak pendek bisa dikatakan *stunting*. Sedangkan menurut WHO pengertian *stunting* adalah sebagai gangguan pertumbuhan yang mengilustrasikan tidak

tercapainya potensi pertumbuhan sebagai dampak status kesehatan atau nutrisi yang tidak maksimal (WHO,2019). Dari pengertian diatas, jika disatukan definisi *stunting* adalah kegagalan mencapai potensi pertumbuhan linier yang dimaksudkan dengan $HAZ < 2 SD$ sesuai dengan *growth reference* yang sedang berlaku dan sekarang digunakan WHO *Child Growth* yang berdampak pada status kesehatan dan nutrisi tidak optimal.

Stunting adalah suatu kondisi dimana tinggi badan seseorang kurang dari normal untuk usia dan jenis kelaminnya. Tinggi badan merupakan salah satu jenis tes *antropometri* dan memperlihatkan status gizi seseorang. Adanya *stunting* menunjukkan malnutrisi (status gizi buruk) pada jangka waktu yang lama (kronis). Akibatnya, seseorang yang menderita *stunting* di usia muda juga dapat menderita kekurangan gizi kronis yang dapat menyebabkan gangguan mental, disfungsi psikomotor dan kecerdasan. Program pencegahan malnutrisi telah ada selama beberapa tahun tetapi tampaknya tidak spesifik untuk malnutrisi kronis yang menyebabkan *stunting*.

Akibatnya, kejadian *stunting* tidak pernah berkurang padahal kejadian gizi buruk lainnya seperti *wasting* (kurus) telah menurun secara signifikan. Mengingat bahaya *stunting* dimasa depan diperlukan analisis penyebab *stunting* dan cara penanggulangannya berdasarkan fakta atau bukti penelitian agar dapat menurunkan prevalensi *stunting* di Indonesia. Diagnosis *stunting* ditegakkan dengan membandingkan nilai z-skor tinggi badan per usia yang ditentukan oleh grafik pertumbuhan yang digunakan secara global.

2.8 Penyebab *Stunting*

Penyebab *stunting* sangat beragam menurut (Siswati, 2018) faktor utama dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Faktor Genetik

Tinggi badan orang tua mempengaruhi terjadinya *stunting* pada anak. Menurut temuan penelitian, ibu dengan tinggi badan <145 cm rentan mempunyai anak pendek 2,13 kali dibandingkan ibu dengan TB normal. Ibu dengan tinggi badan 145-150 cm berpeluang 1,78 kali lebih besar memiliki anak *stunting* dibandingkan ibu normal, sedangkan ibu dengan tinggi badan 150-155 cm berpeluang 1,48 kali memiliki anak *stunting* dibandingkan ibu normal.

Banyak faktor yang mempengaruhi tinggi badan orang tua termasuk faktor internal seperti genetika dan faktor eksternal seperti penyakit dan nutrisi sejak usia muda. Faktor eksternal adalah faktor yang dapat diubah sedangkan faktor genetik adalah faktor yang tidak dapat diubah. Ini berarti bahwa jika ayah pendek ketika gen pada kromosom membawa sifat pendek dan gen ini diturunkan kepada keturunannya, pengerdilan pada anak atau keturunannya menjadi sulit untuk diobati. Namun, jika ayah pendek karena penyakit atau asupan gizi yang buruk sejak usia dini, seharusnya tidak mempengaruhi tinggi badan anak selama anak tidak terpapar faktor risiko lain tinggi badannya bisa normal.

b. Status Ekonomi

Status ekonomi yang kurang dapat diartikan memiliki daya beli yang tidak mencukupi untuk membeli makanan. Kebutuhan gizi anak tidak terpenuhi karena kualitas dan kuantitas makanan yang buruk, padahal anak membutuhkan gizi yang

lengkap untuk tumbuh kembangnya. Menurut temuan, orang tua dengan daya beli rendah jarang memberikan telur, daging, ikan, atau kacang-kacangan setiap hari. Artinya, kebutuhan protein anak tidak terpenuhi karena anak tidak cukup mengonsumsi protein. Anak sering diasuh oleh kakak atau nenek karena ibu harus bekerja membantu suaminya atau menyelesaikan tugas lain karena kakak masih terlalu muda atau nenek terlalu tua ada pengawasan yang kurang.

Pengetahuan pengasuh mengenai gizi juga berdampak *stunting* pada anak. Orang tua terkadang tidak menyadari makanan apa yang diberikan kepada setiap anak setiap hari. Masalah pada kelompok status ekonomi sedang adalah anak kurang nafsu makan. Anak-anak tidak suka masakan rumahan dan lebih suka makanan cepat saji. Anak juga tidak mau makan sayur atau buah waktu kecil. Orang tua tidak mau memaksa karena akan menyebabkan anak menangis. Defisiensi *mikronutrien* yang disebabkan oleh kurangnya sayur dan buah dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan

c. Jarak Kelahiran

Jarak kelahiran mempengaruhi pola asuhnya terhadap anaknya. Jarak kelahiran yang dekat membuat pengasuhan menjadi lebih sulit, sehingga pengasuhan anak kurang optimal. Hal ini dikarenakan anak yang lebih besar belum mandiri dan membutuhkan banyak perhatian terutama dikeluarga berpenghasilan rendah tanpa pembantu atau *babysitter*. Meski ibu masih harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga lainnya, pengasuhan anak sepenuhnya dilakukan oleh ibu akibatnya konsumsi makanan anak terabaikan.

Karena ASI lebih disukai untuk adik-adik, jarak kelahiran kurang dari dua tahun menyebabkan salah satu anak biasanya yang lebih besar tidak menerima ASI yang cukup, anak akan menderita gizi buruk akibat tidak mendapat ASI dan asupan makanan yang kurang yang dapat menyebabkan *stunting*. Untuk mengatasi hal ini, Program Keluarga Berencana harus diperkenalkan kembali sebaiknya ibu dan ayah disarankan untuk menggunakan kontrasepsi sesegera mungkin setelah melahirkan untuk menghindari kehamilan. Banyak orang tua yang ragu-ragu untuk menggunakan kontrasepsi segera setelah kelahiran anaknya, sehingga sering terjadi kehamilan yang tidak terdeteksi hingga usia kehamilan beberapa bulan.

Jarak kehamilan yang terlalu dekat selain tidak sehat juga berbahaya bagi ibu anak yang baru lahir. Kesehatan ibu dapat terancam karena kondisi fisik yang buruk setelah melahirkan sementara juga merawat bayi yang membutuhkan banyak waktu dan perhatian. Ibu hamil yang tidak sehat akan menyebabkan gangguan pada janin, gangguan kandungan pada janin juga akan menghambat pertumbuhan sehingga mengakibatkan *stunting* terjadi.

d. Riwayat BBLR

Berat badan lahir rendah mengindikasikan malnutrisi dalam kandungan, sedangkan *underweight* mengindikasikan malnutrisi akut. *Stunting* adalah akibat dari kekurangan gizi yang berkepanjangan. Bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari normal (2500 g) mungkin memiliki panjang tubuh yang normal saat lahir. *Stunting* tidak akan terjadi sampai beberapa bulan kemudian yang sering diabaikan oleh orang tua. Ketika orang tua baru mengetahui bahwa anak mereka *stunting*, biasanya setelah anak mulai bergaul dengan teman-temannya dan anak

tampak lebih pendek dari teman-temannya. Akibatnya, anak yang lahir dengan berat badan kurang atau anak yang sudah kurus sejak lahir berisiko mengalami *stunting*, semakin dini pencegahan gizi buruk dilaksanakan semakin baik.

e. Asupan Kalsium

Kalsium adalah mineral yang paling melimpah ditulang. Kekurangan kalsium menghambat pertumbuhan tulang pada anak-anak, sedangkan kekurangan kalsium menyebabkan pengeroposan tulang atau *osteoporosis* pada orang dewasa. Menurut temuan penelitian, kekurangan kalsium terkait dengan pengerdilan. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan di Kota Pontianak, yang menemukan bahwa anak *stunting* memiliki asupan kalsium dan fosfor yang jauh lebih rendah dibandingkan anak tidak *stunting* berusia 24-59 bulan. Di Afrika Selatan, para peneliti menemukan bahwa anak-anak berusia 2 hingga 5 tahun memiliki asupan kalsium dan vitamin D yang tidak mencukupi, yang mungkin disebabkan oleh kurangnya minum susu setelah disapih, yang terkait dengan pengerdilan. Menurut penelitian Mongolia, semua anak yang berpartisipasi dalam penelitian ini kekurangan kalsium (Uush, 2014).

2.9 Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting*

Beberapa cara pencegahan dan penanggulangan *stunting*

a. Persiapan dini sebelum menikah

Perkawinan hendaknya tidak hanya memperhatikan kepentingan calon ayah dan ibu atau pasangan suami istri, tetapi juga kepentingan calon anak yang akan dilahirkan. Variasi genetik harus dipertimbangkan dengan tidak adanya keturunan yang tidak berisiko terkena penyakit atau gangguan, termasuk gangguan

pertumbuhan. Hal inilah yang mendorong pelarangan perkawinan kakak adik atau keluarga. Faktor genetik calon orang tua berdasarkan bukti penelitian terkait *stunting* wanita bertubuh pendek dianjurkan untuk menikah dengan pria bertubuh rata-rata atau lebih tinggi dan sebaliknya. Akibatnya, variasi genetik meningkat dan anak yang lahir memiliki peluang lebih baik untuk mencapai tinggi badan normal.

b. Penambahan suplementasi ibu hamil

Perkembangan janin dalam kandungan sangat bergantung pada kesehatan ibu hamil, janin memerlukan kesehatan ibu dan status gizi yang baik agar dapat tumbuh dan berkembang secara normal. Akibatnya, ibu hamil harus memenuhi kebutuhan gizinya baik untuk dirinya maupun janinnya. Selain nutrisi yang dibutuhkan setiap hari ada sejumlah nutrisi khusus yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Perkembangan embrio nutrisi ini meliputi protein serta beberapa *mikronutrien* seperti asam folat, zat besi, yodium dan kalsium. *Mikronutrien* ini dibutuhkan dalam jumlah yang lebih besar selama kehamilan. Ibu hamil biasanya mengonsumsi lebih sedikit karena penurunan nafsu makan, mual dan muntah.

c. Penambahan suplementasi ibu menyusui

Air Susu Ibu (ASI) merupakan sumber nutrisi utama bagi bayi. Akibatnya, kuantitas dan kualitas ASI tidak boleh mencukupi. Kualitas dan kuantitas ASI sangat bergantung pada asupan Gizi Ibu Menyusui. Kebutuhan gizi menyusui hampir identik dengan kebutuhan gizi ibu hamil. Dengan adanya suplementasi *mikronutrien* pada ibu hamil dan menyusui, dapat menurunkan angka kejadian

penyakit akibat defisiensi *mikronutrien* seperti anemia dan suplementasi zat gizi seperti vitamin B12 dan asam folat merupakan salah satu cara untuk mengatasi permasalahan ini.

d. Penambahan suplementasi *mikronutrien* untuk balita

Suplementasi *mikronutrien* lainnya pada balita berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan dan juga berpengaruh terhadap terjadinya penyakit infeksi seperti ISPA dan diare. Seng dan zat besi adalah nutrisi penting untuk fungsi kekebalan tubuh. Kekurangan seng dan zat besi menurunkan kekebalan, membuat balita rentan terhadap penyakit menular. Infeksi penyakit yang sering terjadi pada balita dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan serta menyebabkan *stunting*. Menurut temuan penelitian, kelompok infeksi saluran pernapasan akut lebih sering terjadi pada balita yang menerima suplemen seng dan zat besi (Astuti et al., 2019)

e. Membiasakan kegiatan diluar ruangan untuk anak.

Kegiatan di luar ruangan adalah kegiatan yang dilakukan di luar ruangan dimana anak-anak terkena sinar matahari langsung. Manfaat paparan sinar matahari antara lain pembentukan vitamin D, yang membantu anak terhindar dari kekurangan vitamin D. Selain kalsium dan mineral lainnya, pertumbuhan tulang yang optimal memerlukan vitamin D yang dapat diperoleh dari makanan maupun dari tubuh kita sendiri yang mampu memproduksi vitamin D dengan bantuan sinar matahari. Makanan sumber vitamin D sebagian besar berasal dari produk hewani yang harganya relatif mahal. Pembentukan sementara vitamin D dengan bantuan sinar matahari.

Saat ini, aktivitas anak-anak di luar ruangan sedang menurun. Anak-anak lebih suka bermain dengan perangkat elektronik didalam ruangan, dimana mereka tidak terkena sinar matahari. Hal inilah, yang menyebabkan kejadian kekurangan vitamin D meningkat. Meskipun belum ada data pasti mengenai prevalensi defisiensi vitamin D di Indonesia, namun diduga prevalensi defisiensi vitamin D cukup tinggi.

2.10 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Peran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Menurut Van Meter dan Van Horn (Anggara, 2018) ada enam faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dalam suatu organisasi atau lembaga sebagai berikut:

a. Standard dan Sasaran Program

Menurut Van Meter dan Van Horn, standar dan tujuan kebijakan harus jelas dan terukur karena ketidakjelasan dalam standar dan target kebijakan dapat menimbulkan multitafsir, yang pada akhirnya akan menimbulkan kesulitan implementasi kebijakan. Standar yang jelas dapat menjadi acuan atau payung hukum suatu program

b. Sumber Daya

Menurut Van Meter dan Van Horn, Sumber Daya Manusia dan finansial diperlukan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan yang layak untuk diperhatikan karena dapat memfasilitasi keefektifan implementasi.

c. Disposisi

Jenis kesiapan untuk semua elemen yang dikenal sebagai disposisi. Menurut Soebarsono dalam Nawi (2017: 60-70), disposisi merupakan sikap yang dimiliki oleh aparatur dalam organisasi pemerintahan dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan suatu kebijakan yang sedang berjalan sesuai dengan harapan kebijakan yang telah ditetapkan diatur bersama. Jika cara pandang kebijakan berbeda dengan sikap aparatur organisasi, maka kebijakan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini, berkaitan dengan bagaimana pemahaman para implementor terhadap suatu program atau kebijakan apakah sudah sesuai dengan prosedur.

d. Hubungan Antarorganisasi

Menurut Van Meter dan Van Horn, diperlukan hubungan kerjasama yang sinergis antar instansi terkait untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sebagai akibat dari realitas program kebijakan tersebut, diperlukan adanya hubungan antar instansi terkait, khususnya dukungan komunikasi dan koordinasi.

e. Karakteristik Agen Pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn, untuk mencapai keberhasilan yang maksimal dalam implementasi kebijakan, struktur birokrasi, norma dan pola hubungan dalam birokrasi harus diidentifikasi dan diketahui oleh agen pelaksana. Setiap agen harus mematuhi aturan yang ada.

f. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Menurut Van Meter dan Van Horn, kondisi sosial, ekonomi, dan politik meliputi sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan

implementasi kebijakan. Sejauh mana kelompok kepentingan mendukung implementasi kebijakan, karakteristik partisipan yang mendukung atau menolak implementasi kebijakan, sifat opini publik di lingkungan dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan.

2.11 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode	Hasil
1	(Dompak, 2020) Dialektika Publik, Vol. 5 No. 1 Tahun 2020, ISSN 2621-2218	Aspek Pemberdayaan Kelurahan dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Masyarakat	Kualitatif	Beberapa aspek pemberdayaan harus dapat dilaksanakan dengan maksimal, berupa; kebebasan mobilitas, kemampuan membeli komoditas kecil, kemampuan membeli komoditas besar, terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga, kebebasan relative dari dominasi keluarga, kesadaran hukum dan politik, keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes, jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga.
2	(Ardiansyah et al., 2019), Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.7 No.2 Tahun 2019, ISSN 2477-2458	Peran Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dalam Pengendalian Kuantitas Penduduk Di	Kualitatif	BKKBN Kaltim telah berperan signifikan dalam pengendalian kependudukan, terbukti dengan penguatan akses pelayanan KB (Keluarga Berencana) melalui pemberian pelatihan peningkatan kompetensi manajerial

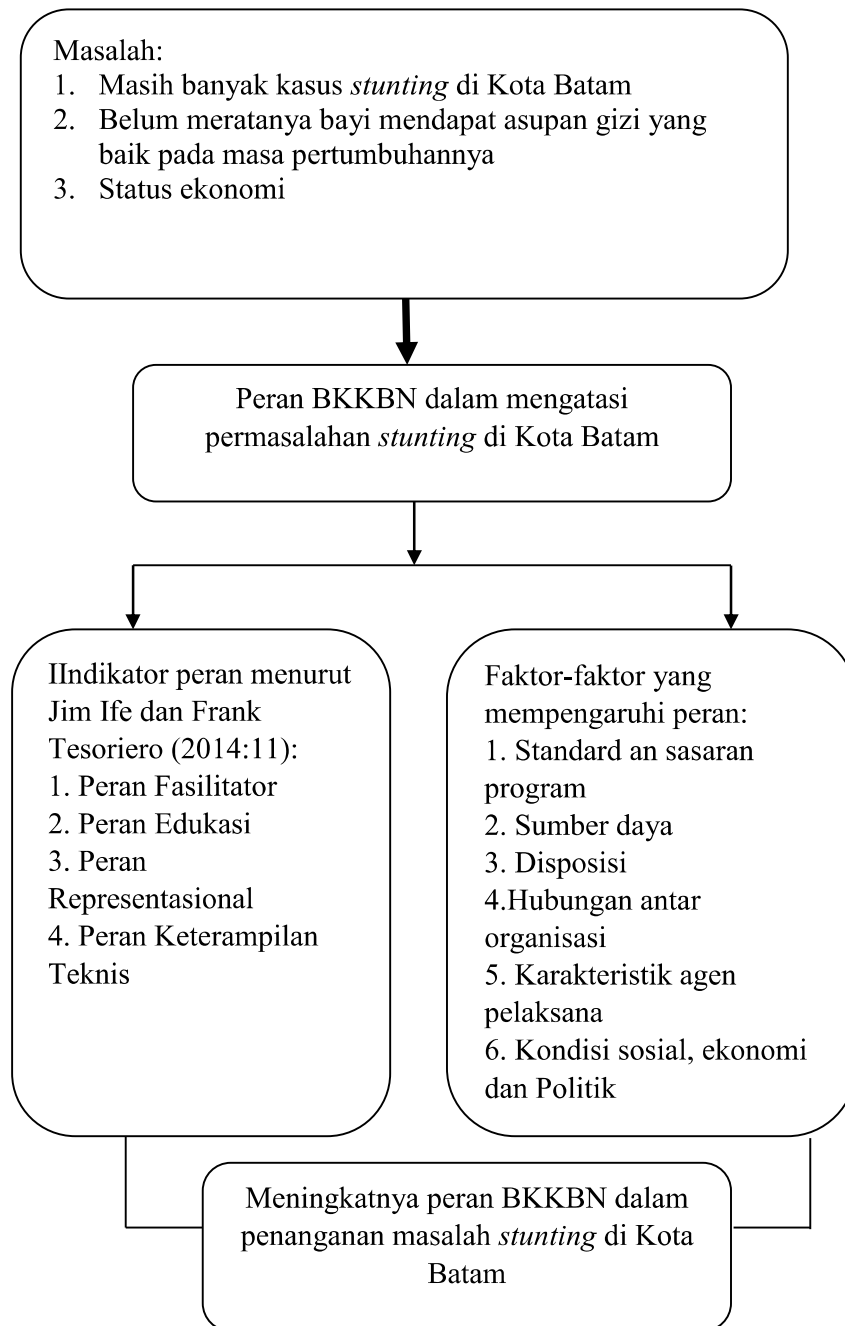
		Provinsi Kalimantan Timur		dan sosial budaya bagi Petugas Keluarga Berencana (PKB) dan Bidang Keluarga Berencana Petugas Penyuluhan (PLKB)
3	(Putra et al., 2021), Jurnal Vokasi Kesehatan, Vol.6 No 2 Tahun 2021, ISSN 2442-5478	Peran Muhammadiyah Dalam Menurunkan Kasus <i>Stunting</i> Di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat	Kualitatif	Peran Muhammadiyah dalam menurunkan kasus <i>stunting</i> di wilayah perbatasan Kalbar, khususnya di Kabupaten Sintang masih kurang
4	(Munawaroh et al., 2022), jurnal Sentra Cendekia, Vol. 3 No 2 Tahun 2022 ISSN 2722-3094.	Peranan Orang Tua Dalam Pemenuhan Gizi Seimbang Sebagai Upaya Pencegahan <i>Stunting</i> Pada Anak Usia 4-5 Tahun	Kualitatif	Orang tua berperan dalam penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan aktivitas fisik dan pemantauan tumbuh kembang secara rutin
5	(Anggraini & Ernita, 2022), JOMIS (<i>Journal of Midwifery Science</i>), Vol.6 No.1 Tahun 2022, E-ISSN : 2579-7077	Peran Amal Usaha Muhammadiyah Dan 'Aisyiyah Dalam Menurunkan <i>Stunting</i> Di Kenagarian Tanjung Bungo	Kualitatif	Ditemukan bahwa peran amal usaha Muhammadiyah dan Aisyiyah di Kenagarian Tanjung Bungo belum dimanfaatkan secara maksimal karena belum adanya kebijakan atau saran dari PDM atau PDA untuk membantu pemerintah dalam mengurangi <i>stunting</i> melalui program pemerintah yang berhasil.
6	(Vizianti, 2022), Jurnal Warta Dharmawangsa 16, Vol.16 No.3 Tahun 2022, ISSN 2716-3083.	Peran Dan Fungsi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Dalam Pencegahan	Kualitatif	Studi tersebut menemukan bahwa dua anak mengalami <i>stunting</i> pada usia empat dan enam tahun setelah diukur dan ditimbang selama tiga

		<i>Stunting</i> Di Kota Medan		bulan berturut-turut di bawah garis merah (BGM).
7	(Ramadhan et al., 2022), Jurnal Bidan Cerdas, Vol.4 No.1 Tahun 2022, ISSN: 2654-9352	Peran Kader dalam Penurunan <i>Stunting</i> di Desa	Kualitatif	Upaya kader berhasil menurunkan prevalensi <i>stunting</i> dari 35,3% pada November 2018 menjadi 16,7% pada Oktober 2019, ASI eksklusif dikaitkan dengan <i>stunting</i> .
8	(C. Scheffler et al., 2019), <i>European Journal of Clinical Nutrition</i> , Vol. 1 No. 1 Year 2019	<i>Stunting is Not a Synonym Malnutrition</i>	<i>Qualitative</i>	<i>The present data seriously question the concept of stunting as prima facie evidence of malnutrition and chronic infection.</i>
9	(Roesler et al., 2019), <i>Journal of Public Health</i> , Vol. 1 No. 9 Year 2019	<i>Stunting, Dietary Diversity and Household Food Insecurity Among Children Under 5 Years in Ethnic Communities of Northern Thailand</i>	<i>Qualitative</i>	<i>Stunting was widespread in children under 5 years of age, in part reflection poor dietary diversity, especially at age 6-11 months. Stunting was worst in households with least assets. Small increases in land or animals, or equivalent resources, appear to be required to improve child nutrition in extremely poor families.</i>

Sumber: Peneliti

2.12 Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran merupakan gagasan tentang bagaimana sebuah teori berhubungan dengan berbagai hal yang telah ditentukan menjadi penting. Cara berpikir peneliti dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka berpikir

Sumber: Peneliti